

STUDI TENTANG PEMBANGUNAN BIDANG PENDIDIKAN OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN MUARA JAWA DI KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KECAMATAN MUARA JAWA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Alfianur Faisal¹

Abstrak

Artikel ini membahas tentang Study pembangunan bidang pendidikan oleh UPTD Pendidikan Muara Jawa di kelurahan Muara Jawa Pesisir yakni melalui pendidikan formal terdapat 6 lembaga pendidikan yang ada masih dinilai sangat sedikit dan membuat lambatnya perkembangan pembangunan pendidikan di Kelurahan Muara Jawa Pesisir. Sedangkan pembangunan bidang pendidikan pada pendidikan non formal di Kelurahan Muara Jawa Pesisir sangatlah sulit dideteksi karena selama ini beberapa perangkat yang bertugas untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pemberdayaan pendidikan dalam bentuk pelatihan, kepanduan, kegiatan-kegiatan yang bersifat mengembangkan kapasitas masyarakat tidak pernah telaksana. Faktor pendukung meliputi fasilitas penunjang seperti bidang umum, jalan dan transportasi dan adanya kebijakan peraturan yang diberlakukan serta komitmen aparatur kelurahan yang menunjang pembangunan pendidikan sedangkan faktor penghambat meliputi dana operasional yang terbatas serta kurangnya peralatan sarana dan prasarana pelayanan meliputi alat peraga pendidikan, peremajaan motor dinas, buku-buku perpustakaan, komputer, dan hal lainnya

Kata Kunci : *Pembangunan, Pendidikan*

Pendahuluan

UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjabarkan di dalam Pasal 3 bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sistem pendidikan nasional adalah mekanisme kerja dalam bentuk berbagai ketentuan, aturan, maupun prosedur yang memungkinkan seluruh komponen sistem pendidikan (pendidikan luar sekolah dan pendidikan. sekolah

¹ Mahasiswa Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Susanti. Email :

untuk berbagai jenis dan jenjang) bekerja dan menunaikan fungsi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Terselenggaranya proses pendidikan yang baik sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana sekolah yang memadai, disamping komponen-komponen pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar yang lain. Dengan amandemen UUD 1945 dan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 013/PUU-VI/2008 yang mengamanatkan agar dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari APBN dan minimal 20 persen dari APBD dimana pemerintah harus menyediakan, serta mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pendidikan dasar tanpa memungut biaya, anggaran pendidikan pada tahun 2004 mendapat porsi yang lebih besar lagi. Dengan dana yang cukup besar tersebut diharapkan dapat membantu dalam pembangunan infrastruktur sekolah seperti penambahan Ruang Kelas Baru, Rehabilitasi Bangunan, Pembelian Alat Peraga Pendidikan, Pembagian Buku Gratis dan lain sebagainya.

Pendidikan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan hal harus ditempuh oleh masyarakat untuk meningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Pemerintahan memprogramkan kebijakan umum pendidikan 2016-2021 yakni peningkatan pemerataan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak diseluruh jenjang pendidikan; Meningkatkan mutu, relevansi pendidikan formal dan non formal; Peningkatan rata-rata lama sekolah penduduk dan peningkatan kecakapan hidup, pendidikan karakter dan keaksaraan fungsional.

Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai program yang sangat baik karena pendidikan telah digratiskan hingga jenjang SMP (Sekolah Menengah Pertama) yang dikenal dengan penerapan wajib belajar 9 tahun agar masyarakat dapat menikmati pendidikan pendidikan. Bahkan mulai tahun ajaran 2014 pendidikan di kabupaten Kutai Kartanegara telah ditingkatkan oleh pemerintah menjadi wajib belajar 12 tahun selain. Itu artinya masyarakat dapat menikmati pendidikan hingga jenjang SMA (Sekolah Menengah Atas) secara gratis selain itu menjadi prioritas pertama sebagai jalankan pola peningkatan pendidikan, pemerintah juga mendatangkan konsultan Cambridge University untuk memperoleh arah program sesuai dengan kebutuhan di wilayah kabupaten Kutai Kartanegara.

Kelurahan Muara Jawa Pesisir terletak di Jalan Teluk Ladang No. 19 Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara. Letak tersebut berada di daerah pesisir yang cukup sulit akan akses keramaian dan masih sedikitnya masyarakat yang memiliki pola pikir akan pentingnya pendidikan. Namun hal tersebut tidak menjadi tolak ukur masyarakat Muara Jawa Pesisir untuk mengancam pendidikan hingga ke perguruan tinggi (PT). Selain itu menurut observasi awal yang dilakukan, penduduk yang masih berusia produktif untuk mengenyam pendidikan, tidak bersekolah karena disibukkan dengan pekerjaan yang lebih dinilai menguntungkan karena pola pikir masyarakat lebih mementingkan pendapatan keluarga daripada pendidikan secara lebih jauh inilah

salah satu faktor penghambat program yang terus dilakukan pemerintah yakni Zona Bebas Pekerja Anak (ZBPA). Secara umum perkembangan Program (ZBPA) sudah dilaksanakan sejak 4 November 2003, diharapkan anak-anak di Kabupaten Kutai Kartanegara yang tumbuh dan berkembang dapat lebih dimaksimalkan masa kecilnya melalui kegiatan pendidikan di sekolah sampai dengan umur 18 tahun dan menjadi percontohan Kabupaten Layak Anak (KLA). Disamping itu terdapat proses pembangunan sumber daya manusia pendidikan yakni pemerataan pendidikan sekolah yang terputus setelah umur 12 tahun pada tingkat sekolah lanjutan tingkat pertama dan masih banyak masyarakat buta huruf dan aksara, diharapkan adanya bantuan pendidikan pada alokasi anggaran tahun 2016 ini dapat berjalan dengan baik, selain itu proses pengawasan dari seluruh aspek tidak terlepas dari peran serta kelurahan yang mengontrol proses pembangunan tersebut. Beberapa faktor inilah yang menjadi penting untuk dilakukan sebuah penelitian. Penelitian ini memfokuskan pada studi pembangunan bidang pendidikan serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat pendidikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Muara Jawa di Kelurahan Muara Jawa Pesisir.

Berdasarkan latar belakang di atas perlu adanya studi langkah pelaksanaan pembangunan bidang kelurahan dari seluruh kesatuan stake holder (pihak pendukung) sebagai gerakan bersama untuk memperhatikan proses pembangunan pendidikan, maka penulis berupaya untuk memberikan setitik sumbangan pemikiran dalam bentuk skripsi dengan judul: “Studi Pembangunan Bidang Pendidikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Muara Jawa di Kelurahan Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara”.

Kerangka Dasar Teori

Metode Penelitian

Menurut Denzin dan Lincoln (dalam Lexy J. Moleong, 2008:5), “Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada”.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Arikunto Suharsimi (2005:234), penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai sesuatu gejala yang ada, yaitu gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Dengan begitu peneliti akan berusaha menggambarkan apa adanya tentang sesuatu variabel, gejala atau keadaan yang ada pada saat penelitian dilakukan.

Menurut *Jane Richie* dalam bukunya Moleong (2004:6): penelitian kualitatif adalah “upaya untuk menyajikan dunia sosial dan perspektifnya di dalam dunia dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang di teliti”, sehingga penelitian kualitatif ini bertujuan untuk menyajikan dunia sosial dan menjelaskan tentang Studi Pembangunan Bidang Pendidikan

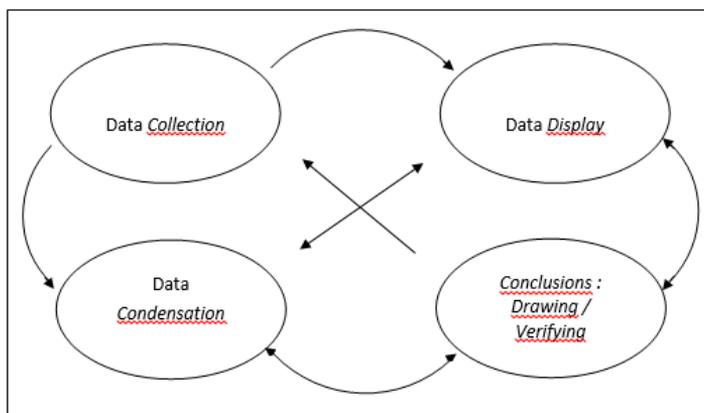
oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan di Kelurahan Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yakni mengetahui pembangunan bidang pendidikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Muara Jawa di Kelurahan Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara dan mendeskripsikan faktor penghambat pembangunan bidang pendidikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Muara Jawa di Kelurahan Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara

Sehingga mendapatkan fokus penelitian: variabel indikator keberhasilan pembangunan proses pembangunan dalam bidang pendidikan antara lain Pembangunan bidang pendidikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan di Kelurahan Muara Jawa Pesisir yakni Pendidikan Formal dan Pendidikan Non Formal serta mencari faktor Penghambat pembangunan bidang pendidikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan di Kelurahan Muara Jawa Pesisir.

Teknik analisis data menggunakan teknik Maththew B. Miles, dkk (2014:33), yang terdiri dari 3 komponen, berikut penjelasannya: Kondensasi data merujuk pada proses memilih, memfokuskan, menyerderhanakan, mengabstrakkan, dan mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya. Melalui kondensasi, kita membuat data lebih “kuat”. (kita menjauhkan diri dari reduksi data sebagai sebuah pola sebab hal itu menunjukkan kita lemah atau kehilangan sesuatu di dalam proses tersebut) Kedua, Penyajian Data (*Data Display*) Alur penting kedua aktifitas analisis adalah penyajian data. Secara umum, sebuah penyajian adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi.pada kehidupan sehari-hari, melihat penyajian-penyajian membantu kita memahami apa yang sedang terjadi dan untuk melakukan sesuatu termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman itu. Dan yang ketiga adalah Pengambilan Kesimpulan Dan Verifikasi (*Drawing And Verifying Conclusion*). Alur ketiga dari aktivitas analisis adalah pengambilan kesimpulan verifikasi. Dari awal pengumpulan data, analisis kualitatif menginterpretasikan hal-hal apa yang tidak berpola, penjelasan-penjelasan, alur kausal, dan proposisi. Peneliti yang kompeten berpegang pada kejelasan kesimpulan, membangun keterbukaan dan *skeptic*, tetapi kesimpulan tetap ada, tidak jelas pada mulanya, kemudian bertambah secara eksplisit dan mendasar. Kesimpulan akhir tidak akan datang hingga pengumpulan data terakhir tergantung pada ukuran catatan lapangan: pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian yang digunakan; daya Tarik peneliti; dan batas-batas lain yang dapat ditemukan.

Gambar 3.1. Analisis Data Model Interaktif



Sumber : Matthew B. Miles, A. Michael Huberman dan Johnny Saldana (2014: 33)

Adapun penjelasan dari gambar analisis data dan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman adalah sebagai berikut:

1. Kondensasi Data (*Condensation Data*)
2. Penyajian Data (*Display Data*)
3. Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/ Verifying*)

Hasil Penelitian

Studi Tentang Pembangunan Bidang Pendidikan Oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Muara Jawa Di Kelurahan Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Muara Jawa merupakan wilayah kerja kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten/ Kota dan menjalankan kewenangannya sesuai yang dilimpahkan oleh Camat Muara Jawa, dengan wilayah seluas 42.000 Km². Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Muara Jawa merupakan salah satu lembaga di Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengurus semua hal yang berkaitan dengan terselenggaranya pendidikan baik dari segi kebijakan yang diambil, tenaga pendidik profesional yang tersedia, maupun pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. Letaknya yang berdekatan dengan beberapa kantor pemerintah kecamatan Muara Jawa serta dapat dijangkau oleh angkutan umum sehingga memudahkan dalam hal pelayanan publik.

Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Muara Jawa yang terjadi tersebut, maka akan mempengaruhi pula pada struktur organisasi yang ada di lingkup Kecamatan, karena struktur organisasi merupakan suatu susunan mekanisme

kerja antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Sehingga organisasi dapat dikatakan dengan jelas seperti susunan tingkat unit-unit dan tingkatan jabatan, disamping itu juga menjelaskan tentang pembagian tugas dan tata hubungan dari masing-masing unit atau bidang tertentu.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 104 Tahun 2006 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Muara Jawa, susunan organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagaimana terlampir dan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kegiatan pendidikan lingkup pemerintahan kecamatan dan melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya.
- b. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pelayanan umum terhadap masyarakat dan menyelenggarakan pendidikan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta pembinaan lembaga kemasyarakatan bidang pendidikan.
- c. Pelaksanaan pelaporan kegiatan tugas secara periodik dan tepat waktu kepada Kepala Daerah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten oleh beberapa susunan perangkat pendidikan di Kecamatan Muara Jawa.
- d. Pelaksanaan koordinasi terhadap jalannya pemerintah Kecamatan dan pelaksanaan pembangunan khususnya bidang pendidikan.

Pendidikan Formal

Pendidikan Formal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jalur pendidikan yang terseruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Jenjang pendidikan formal (1) Pendidikan dasar, merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. (2) Pendidikan menengah, merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat. (3) Pendidikan tinggi, merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doctor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.

Adapun tabel penjelasan secara mudah untuk melihat gambaran pembangunan di bidang pendidikan pada pendidikan formal adalah sebagai berikut :

Tabel 4.7
Jadwal Pendidikan Formal

NO	Kegiatan Pendidikan	Hari	Waktu	Pelaksanaan Lapangan
1	TK/ RA Al Qodiri Muara Jawa	Senin-Sabtu	08.30-10.30	Anak-anak dan Guru
2	SDN 008 Muara Jawa	Senin-Sabtu	08.00-13.00	Anak-anak dan Guru
3	SDN 006 Muara Jawa	Senin-Sabtu	08.00-13.00	Anak-anak dan Guru
4	SDN 014 Muara Jawa	Senin-Sabtu	08.00-13.00	Anak-anak dan Guru
5	SD Muhammadiyah Muara Jawa	Senin-Jumat	08.00-16.00	Anak-anak dan Guru
6	Madrasah Tsanawiyah Negeri Muara Jawa	Senin-Sabtu	08.00-13.30	Anak-anak dan Guru

Sumber: Data Diolah

Dari tabel diatas jadwal pendidikan formal lebih dilaksanakan seperti pendidikan lainnya seperti berangkat dari hari senin sampai dengan hari Sabtu hanya Sekolah Dasar Muhammadiyah saja yang melaksanakan kegiatan mengajar dan belajar pada hari senin sampai dengan hari jumat, ini dikarenakan sekolah tersebut menggunakan standar pendidikan sekolah *Full Day*. Selain itu pendidikan di Kelurahan Muara Jawa Pesisir yang melaksanakan proses kegiatan Pelaksana Lapangan hanya anak-anak dan guru sesuai dengan tugas yang telah diberikan oleh UPT Dinas Pendidikan Muara Jawa dalam mengembangkan pembangunan bidang pendidikan formal.

Dari beberapa wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan pembangunan bidang pendidikan proses pendidikan formal di Kelurahan Muara Jawa Pesisir melalui 6 lembaga pendidikan yang ada masih dinilai sangat sedikit dan membuat lambatnya perkembangan pembangunan pendidikan di Kelurahan MJP. Permasalahan pendidikan di Kelurahan MJP oleh pihak pemerintah hanya dianggap sebelah mata karena letak Kelurahan sangat jauh dari kantor Bupati yang mengakibatkan proses bantuan dan perhatian sangat kurang. Permasalahan yang lain salah satunya adanya dana operasional untuk guru memang mendukung dalam kegiatan belajar namun program bantuan yang seharusnya dibayarkan tidak dilaksanakan dengan baik karena anggaran pemerintah kabupaten sedang mengalami defisit yang mengakibatkan para guru harus lebih berjuang dengan keras menggunakan biaya operasional pribadi untuk melaksanakan kewajiban mengajar anak-anak di Kelurahan MJP. Fasilitas sarana dan prasarana dalam kegiatan mengajar dan belajar juga hanya dilaksanakan apa adanya yang membuat tidak maksimal pembangunan bidang pendidikan yang ada.

Pembangunan dalam hal pendidikan dilihat dari proses kegiatan dapat membedakan orang mulai dari cara berpikir, cara berbicara bahkan pekerjaan

seseorang. Adanya tingkat pendidikan yang sudah terstruktur polanya, diharapkan pendidikan formal membuat perubahan perkembangan pembangunan pendidikan di Kelurahan Muara Jawa Pesisir. Sering kali perhatian pemerintah Kabupaten kepada kelurahan MJP lebih mengutamakan sektor anak didik bukan kepada pengajar/ pelaku pendidikan. Ini berakibat rendahnya tingkat pendidikan di Kelurahan MJP. Selama ini beberapa program dari pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara juga menjalankan kebijakan secara baik seperti membuat rumah bagi aparatur pendidikan melalui kerja sama dengan PGRI dan Bank BTN, memberikan tunjangan 3 kali lipat kepada pengajar untuk mengajar di daerah terpencil dan pesisir, pemerintah juga memberikan program satu guru satu laptop karena para pengajar juga harus diberikan perhatian yang lebih guna meningkatkan kapabilitas dan kemampuan berteknologi secara global. Namun keseluruhan bantuan yang ada tidak tersalurkan dengan baik kepada guru yang memang membutuhkan program tersebut.

Bantuan kepada murid/ anak-anak pelajar untuk menambah kebutuhan sekolah dalam pendidikan Formal memang sangat membantu siswa yang ingin membeli seperti seragam sekolah, buku penunjang pendidikan dan lain sebagainya. Bantuan-bantuan ini secara jelas memang salah satu tugas pemerintah di wilayah Kelurahan MJP untuk meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan agar tingkat pendidikan di Kelurahan MBJ semakin maju. Pendidikan formal dilaksanakan seperti pendidikan lainnya seperti berangkat dari hari senin sampai dengan hari Sabtu hanya Sekolah Dasar Muhammadiyah saja yang melaksanakan kegiatan mengajar dan belajar pada hari senin sampai dengan hari jumat, ini dikarenakan sekolah tersebut menggunakan standar pendidikan sekolah *Full Day*. Selain itu pendidikan di Kelurahan Muara Jawa Pesisir yang melaksanakan proses kegiatan Pelaksana Lapangan hanya anak-anak dan guru sesuai dengan tugas yang telah diberikan oleh UPT Dinas Pendidikan Muara Jawa dalam mengembangkan pembangunan bidang pendidikan formal.

Pendidikan Non Formal

Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan non formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/ atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan ini meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak (kelompok bermain, taman penitipan anak), pendidikan kepemudaan (organisasi keagamaan, organisasi pemuda, organisasi kependuan/ kepramukaan, organisasi palang merah, organisasi pecinta alam & lingkungan, organisasi kewirausahaan, organisasi masyarakat, organisasi seni dan olahraga, organisasi lain yang sejenis), pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan ketrampilan & pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan (program paket A setara SD/MI, program paket B setara SMP/MTs, program paket C setara SMA/MA, paket C Kejuruan setara SMK/MAK).

Dari beberapa wawancara diatas bahwasanya dapat disimpulkan pembangunan bidang pendidikan proses pendidikan non formal di Kelurahan Muara Jawa Pesisir oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Muara Jawa menggambarkan bahwa pembangunan bidang pendidikan pada pendidikan non formal adalah masih tidak berjalan dengan baik karena masyarakat di sana sulit menemukan pendidikan non formal. Kepala UPTD Pendidikan Muara Jawa selalu menjaga hubungan dengan banyak pihak, namun seringkali memerankan serta mengawal para aparat untuk bisa menjalankan fungsi dan tugasnya dalam mengembangkan sektor pendidikan non formal cukuplah sulit. Pendidikan non formal di Kelurahan MJP sangatlah sulit dideteksi karena selama ini beberapa perangkat yang bertugas untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pemberdayaan pendidikan dalam bentuk pelatihan, kependuan, kegiatan-kegiatan yang bersifat mengembangkan kapasitas masyarakat Kelurahan MJP tidak pernah telaksana. Faktor yang dinilai menjadi tolak ukur gagal nya pendidikan non formal di Kelurahan MJP ialah tidak ada pelaku lembaga maupun peserta untuk membuat dan menghadiri kegiatan pendidikan non formal.

Beberapa petugas yang menjadi pelaksana pembangunan bidang pendidikan yakni pihak terkait dari unsur UPTD dan Pemerintahan yang membuat pembangunan pendidikan di Kelurahan MJP belum pernah melihat adanya kegiatan non formal seperti kegiatan pelatihan karang taruna, pramuka dan kependuan, pecinta alam, perkumpulan organisasi masyarakat, organisasi seni dan organisasi sejenis lainnya, ataupun kegiatan pemberdayaan perempuan dan pendidikan pemberantasan buta aksara. Proses yang berkembang dalam para pengajar sebenarnya ingin membuat beberapa kegiatan pendidikan non formal seperti itu namun kegiatan tersebut sulit untuk dilaksanakan karena faktor lokasi masyarakat yang masih menggunakan transportasi sungai serta adanya pengumpulan warga dalam satu waktu dan satu tempat dinilai cukup berat untuk dilakukan, selain itu adanya kesibukan masing-masing para calon peserta pendidikan non formal dan masih rendahnya tingkat kepentingan akan pengembangan kapasitas penambah atau pelengkap kebutuhan ilmu pengetahuan. Ini menyebabkan pembangunan bidang pendidikan belum melaksanakan secara maksimal akan pentingnya pendidikan non formal. Pendidikan non formal juga dianggap masyarakat sebagai pelengkap kebutuhan pendidikan formal saja sehingga masyarakat juga enggan untuk menghadiri kegiatan yang akan dilaksanakan guna menambah kapasitas pengembangan atau pelengkap kebutuhan ilmu pengetahuan.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Dari hasil temuan di lapangan menunjukkan terdapat beberapa faktor pendukung, antara lain :

- a. Fasilitas Penunjang Umum. Dalam konsep fasilitas, sebuah perlengkapan sumber daya manusia ialah adanya alat-alat peraga guna memberikan pemahaman serta memudahkan pelaksanaan kinerja dalam mengatasi semua permasalahan. Di dalam melaksanakan program-program

pendidikan agar mendapatkan hasil yang optimal, sudah tentunya harus didukung oleh fasilitas-fasilitas yang memadai selain SDM yang baik pula. Adapun fasilitas penunjang yang ada di Kelurahan Muara Jawa antar lain :

- 1) Adanya Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak atau Raudatul Athfal/ RA Al-Qodiri (Pendidikan dibawah 6 tahun), kemudian adanya 4 sekolah dasar yaitu SDN 014, SDN 008, SDN 006 dan SD Muhammadiyah Muara Jawa, kemudian yang terakhir adanya satu lembaga pendidikan setingkat SLTP yakni Madrasah Tsanawiyah Muara Jawa.
 - 2) Kantor Pemerintahan Desa yang *representative* untuk melaksanakan semua kegiatan pemerintahan untuk mendukung proses pendidikan dengan 1 buah Ruang Perbedes/Lurah, 1 ruang Sekretaris Kelurahan, 1 Ruang Kepala Urusan, 1 buah lobby pada lantai dasarnya sedangkan 1 buah ruang rapat kapasitas 50 orang, 1 buah ruang perpustakaan, 1 buah ruang sekretariat BPD, 1 buah ruang Sekretariat LPM dan 1 buah ruang sekretariat PPK dan Hansip.
 - 3) Lapangan sepakbola di belakang kantor Kelurahan yang dapat juga dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan olahraga selain sepakbola termasuk event-event yang berkaitan dengan Kelurahan Muara Jawa Pesisir baik secara dinas maupun adat istiadat.
- b. Kebijakan Peraturan yang diberlakukan. Dalam usaha mencapai tujuannya, proses pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan di Kelurahan MJP sebagai upaya untuk meningkatkan pentingnya pendidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal perlu adanya pemahaman produk hukum guna memperbesar kemungkinan untuk meningkatkan kinerja program. Berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 7 tahun 1983, Desa/ Kelurahan adalah organisasi masyarakat yang di akui dan di bina oleh pemerintah. Dalam BAB I: Ketentuan Umum, pasal 1, ayat 1: Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang di bentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa/ Kelurahan dalam keseluruhan pembangunan termasuk bidang pendidikan. Sedangkan susunan yang terlibat dalam pembangunan ingat Desa/ Kelurahan pada dalam BAB IV pasal 7: Jenis lembaga kemasyarakatan terdiri dari – Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK), tim penggerak PKK Desa/ Kelurahan, RT, Karang Taruna, lembaga kemasyarakatan lainnya. Terkait pendanaan proses pembangunan dalam pendidikan bisa melalui bantuan dari anggaran pemerintah Desa/ Kelurahan dan bantuan dari pemerintah Propinsi, Kabupaten/ Kota dan bantuan lain yang sah dan tidak mengikat dan menetapkan pungutan kepada masyarakat.
- c. Komitmen UPTD Pendidikan Muara Jawa dan Aparatur Kelurahan serta Perangkat Pendidikan. Dalam usaha mencapai tujuannya, dalam menjadi

kelurahan yang dilandasi spirit visi dan misi dalam proses pembangunan bidang pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian pegawai, pengembangan SDM yaitu pegawai/ aparatur yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu guna memperbesar kemungkinan untuk meningkatkan kinerja.

Sedangkan beberapa faktor penghambat tersebut, beberapa kendala-kendala yang ada yakni sebagai berikut :

- a. Dana Operasional yang dianggarkan terbatas. Dana operasional yang cukup tinggi seperti pembiayaan meliputi gaji guru, pengadaan peralatan praktek, Alat tulis kantor, biaya kegiatan proses belajar mengajar, biaya kegiatan ekstra dan intrakurikuler. Selain itu biaya operasional juga mencakup biaya personel yang meliputi belanja seragam sekolah, biaya transportasi, buku penunjang belajar lainnya, dan biaya pribadi lainnya terkait keperluan pendidikan yang keseluruhannya didanai oleh dana BOSNas, BOSDa dan BOSKab ke setiap satuan pendidikan dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA/SMK. Namun dana BOSNas dan dana BOSDa tidak dapat disalurkan karena menjadi beban pemerintah dan dialihkan keseluruhan ke dana BOSKab di tingkat Kabupaten jadi nilai dana operasional yang didapat tidak sesuai dengan kinerja dilapangan. Melihat permasalahan tersebut Dinas Pendidikan Kabupaten berupaya menganggarkan Dana Operasional di APBD Kabupaten melalui anggaran 20 % untuk pendidikan, namun seperti yang telah diketahui anggaran Kutai Kartanegara sedang mengalami defisit yang cukup signifikan walaupun anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Pusat lebih besar dari anggaran 10 kabupaten/ kota di provinsi Kalimantan Timur, pada saat ini Kutai Kartanegara mengalami penurunan akibat sumber Pendapatan Asli Daerah Kutai Kartanegara tahun 2016 hanya 858 Milyar padahal tahun sebelumnya yakni tahun 2015 mencapai 911 Milyar sedangkan target untuk tahun 2016 mencapai 1 Trilyun tidak tercapai, permasalahan ini juga berpengaruh terhadap mata anggaran yang dimiliki oleh pihak Kelurahan guna membiayai seluruh alokasi anggaran kantor Kelurahan baik secara belanja maupun operasional kegiatan lainnya tercakup alokasi dana pengelolaan pembangunan bidang pendidikan.
- b. Kurangnya Peralatan Sarana dan Prasarana Pendidikan. Fasilitas merupakan penunjang kegiatan bagi pelaksanaan pendidikan formal di Kelurahan MJP seperti sarana pendidikan bidang non formal tidak ditemukan di Kelurahan MJP selain itu akses transportasi air yang masih sedikit di bangunnya jembatan penyeberangan untuk melakukan kegiatan sekolah. Dengan adanya fasilitas pendidikan yang kurang memadai, tentu akan menghambat kegiatan pendidikan termasuk didalamnya dalam proses kegiatan mengajar kepada anak-anak yang ingin menambah ilmu pengetahuan. Secara garis besar dimana peran serta seluruh perangkat pendidikan sangat tergantung oleh fasilitas-fasilitas yang menunjang kinerja pendidikan tersebut. Dengan adanya fasilitas yang tepat dan

dibutuhkan penunjang lainnya, maka pelaksanaan proses pembangunan bidang pendidikan yang ada dapat berjalan dengan baik pula, namun jika fasilitas yang ada kurang memadai maka proses pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan pun akan terhambat, sehingga mengakibatkan kurang maksimalnya pengembangan pembangunan pendidikan yang diberikan.

Penutup

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, terdapat beberapa kesimpulan dalam pembangunan bidang pendidikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan di Kelurahan Muara Jawa Pesisir bahwa Pembangunan bidang pendidikan oleh UPT Dinas Pendidikan pada pendidikan formal melalui 6 lembaga pendidikan yang ada masih dinilai pengelolaan yang kurang maksimal dan masih sedikit jumlah lembaga pendidikan membuat lambatnya perkembangan pembangunan pendidikan di Kelurahan Muara Jawa Pesisir. Permasalahan pendidikan di Kelurahan oleh pihak pemerintah hanya dianggap sebelah mata karena letak Kelurahan sangat jauh dari kantor Bupati yang mengakibatkan proses bantuan pembangunan dan perhatian pendidikan sangat kurang. Pembangunan bidang pendidikan pada pendidikan non formal di Kelurahan Muara Jawa Pesisir sangatlah sulit dideteksi karena selama ini beberapa perangkat yang bertugas untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pemberdayaan pendidikan dalam bentuk pelatihan, kependuan, kegiatan-kegiatan yang bersifat mengembangkan kapasitas masyarakat Kelurahan Muara Jawa Pesisir tidak pernah telaksana. Faktor yang menjadi tolak ukur gagalnya pendidikan non formal ialah tidak ada pelaku lembaga maupun peserta untuk membuat dan menghadiri kegiatan pendidikan tersebut.

Adapun faktor pendukung dan penghambat Pembangunan bidang pendidikan oleh UPT Dinas Pendidikan Faktor pendukung meliputi fasilitas penunjang seperti adanya lembaga pendidikan ditingkat kelurahan dari tingkat TK/RA sampai SLTP/ MTs dan adanya kebijakan peraturan yang diberlakukan serta komitmen aparatur kelurahan yang menunjang pembangunan pendidikan yang dilaksanakan menjadi keuntungan Kelurahan Muara Jawa Pesisir. Faktor penghambat meliputi dana operasional yang terbatas seperti gaji guru, pengadaan peralatan praktek, Alat tulis kantor, biaya kegiatan proses belajar mengajar, biaya kegiatan ekstra dan intrakurikuler. Serta kurangnya peralatan sarana dan prasarana pelayanan meliputi akses pembangunan sarana pendidikan non formal dan kurangnya transportasi air (jembatan penyeberangan).

Saran

Penelitian ini menyarankan untuk UPTD Pendidikan Muara Jawa, diharapkan dapat memberikan tekanan kepada pihak kabupaten melalui penambahan gaji untuk guru honorer dan penambahan biaya operasional di

wilayah medan yang sulit serta adanya penambahan jumlah guru yang bertugas kepada Bupati Kutai Kartanegara. Selain itu UPTD mewajibkan para Guru-guru yang bertugas senantiasa bersabar dengan kondisi pendidikan saat ini. Bagi Pemerintah Kelurahan dan Pemerintah Kabupaten, diharapkan dapat mencari jalan dengan stake holder (Perusahaan, TNI dan Muspida) guna memberikan masukan dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang sesuai dengan kondisi realita lapangan Kelurahan Muara Jawa Pesisir. Sedangkan bagi masyarakat Kelurahan Muara Jawa Pesisir, harus memiliki pengetahuan secara luas melalui belajar di perpustakaan Kelurahan untuk bisa menempuh jalur pendidikan tambahan dan dapat memberi untuk menjadi manusia cerdas yang berguna bagi bangsa dan negara.

Daftar Pustaka

Sumber Referensi :

- Arikunto. 2009. *Populasi, Sampel dan Aplikasinya*, Bandung: CV. Indonesia
- Alexander. 2004. *Pembangunan Dalam Proses Kesejahteraan Bangsa*, Yogyakarta: CV. Indonesia.
- Deddy T. Tikson, 2005, *Analisis Administrasi Manajemen dan Kepimpinan Pendidikan*, Jakarta : CV. Bumi Aksara.
- Djojohadikusuma, S, 2006, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen*, PT Gunung Agung. Jakarta.
- Domar, Harrod, 2003, *Pembangunan Perspektif: Modernisasi Klasik*, Bandung: Publising Hend.
- Fattah, Ardin. 2004, *Kurikulum Pendidikan di Indonesia: Ekspektasi dan Implementasi*, Bandung: Obor Publising
- Horton dan Hunt. 2004, *Pengantar Ilmu Manajemen*, Jakarta: PT. Prehallindo.
- Jalaludin, 2002, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Gunung Sari Agung, Jakarta.
- Kartasasmita, G. 2004. *Indonesia dalam Bingkai Pembangunan Nasional*. Jakarta: Public Publising.
- Matthew B. Miles, dkk. 2014. Analisis data Kualitatif. Bandung: CV. Merbabu
- Moleong, Lexy J, 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Moleong, Lexy J, 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Edisi Revisi, cetakan ke dua puluh enam PT. Remaja Rosdakarya: Bandung
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Portes, 2006. *Equalibrium Education for Civil Society*. Birmingham Press: London
- Salehindo, John, 2005, *Pengawasan Melekat*, Bumi aksara, Jakarta.
- Suryani, 2004, *Pengertian dibidang pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Singarimbun, Masri. 2002. *Penelitian Kualitatif Deskriptif dan Penyelesaiannya*. PT. Adiwira Pustaka, Yogyakarta

- Sugiono, 2007, *Pendidikan Umum dan Pendidikan Khusus (Teori dan Implementasi)*. Jakarta: CV Teknik Jaya
- Sugiono, 2013. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Sujana, N. 2009, *Administrasi pembangunan desa dan sumber-sumber pendapatan desa*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Suwarso dan Suyoto, 2004. *Dasar-dasar organisasi dan manajemen*, Rineka cipta, jakarta.
- Siagian, 2004. *Aspek-aspek pengawasan di indonesia* , Jakatra: Sinar grafika.
- Riyadi dan SB, Deddy. 2005. *Modernisasi dalam Multi Aspek Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka
- Tika, MP. 2006. *Pendalaman Pencarian Sosial Melalui Populasi*. Yogyakarta: CV. Obor Masyarakat Madani
- William, Platt. S, 2002, *Pemerintah desa dan adminsitration jakarta* PT. Raja grafindo persada: Bandung

Sumber Dokumen :

- Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia - Amandemen 4*
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*
- Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia*
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan*
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standart Sarana Prasarana*
- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 191 tentang Program Gerbang Dayaku II*
- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 231/EKS.2007 tentang Pendidikan Zona Pekerja Bebas Anak*